

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Produk domestik bruto di Indonesia ditopang oleh sejumlah sektor, Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor penopang terbesar dalam produk domestik bruto Indonesia. Menurut data BPS (2020) sektor tersebut menopang struktur produk domestik bruto di Indonesia sebesar 12,72 persen dari total PDB nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada peringkat ketiga di bawah sektor industri dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini memiliki makna bahwasannya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berperan sangat tinggi terhadap tingkat pertumbuhan nasional Indonesia. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Terlebih lagi menurut nawacita presiden bahwa pada tahun 2045 Indonesia mempunyai target guna dijadikan lumbung pangan dunia melalui penetapan 11 komoditas pangan strategis. Komoditas-komoditas strategis tersebut antara lain daging sapi, gula, cabai, bawang putih, bawang merah, kedelai, jagung dan padi (BPS, 2020:46).

Tabel 1.1
Distribusi PDB menurut Lapangan Usaha
Dalam Persen (%)

Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,48	13,16	12,81	12,72
Pertambangan dan Pengalihan	7,18	7,58	8,08	7,26
Industri Pengolahan	18,21	20,16	19,86	19,7
Pengadaan Listrik dan Gas	1,15	1,19	1,19	1,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07
Konstruksi	10,38	10,38	10,53	10,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,19	13,02	13,02	13,01
Transportasi dan Pergudangan	5,2	5,41	5,38	5,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,93	2,85	2,78	2,78
Informasi dan Komunikasi	3,62	3,78	3,77	3,96

Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,19	4,2	4,15	4,24
Real Estate	2,83	2,81	2,74	2,77
Jasa Perusahaan	1,71	1,75	1,8	1,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	3,67	3,65	3,62
Jasa Pendidikan	3,37	3,29	3,25	3,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,07	1,07	1,1
Jasa Lainnya	1,7	1,76	1,81	1,95

Sumber: BPS (2020)

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan penopang perekonomian di Indonesia tidak banyak mempunyai perbedaan dengan negara lainnya khususnya ASEAN. Beberapa Negara di ASEAN juga masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk menopang struktur produk domestik pada masing-masing negaranya. Sebagai contoh di Thailand, bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 8,4% dalam struktur PDB Negara Thailand pada tahun 2019 (Bank Of Thailand, 2020). Sebesar 40 persen dalam keseluruhan penduduk Thailand bekerja untuk industri yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Malaysia juga mencatatkan kontribusi sebesar 7,28 persen terhadap PDB Malaysia tahun 2019 (Statistica, 2020). Pada Negara Vietnam, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi diurutkan ke empat dari keseluruhan sektor yang berkontribusi pada PDB Vietnam. Hal ini berarti, bahwa sektor ini masih berperan penting pada hal pertumbuhan perekonomian pada masing-masing Negara di ASEAN.

Hoang (2020) menyatakan bahwa Negara-Negara ASEAN mencapai daya saing terkuat dalam beras, karet, rempah, minyak nabati, kayu, kayu bakar, dan ikan. Daya saing yang berada di ASEAN berpola konvergen yang menjadikan Indonesia, Vietnam, dan Thailand sebagai pemain terkuat sedangkan Brunei, Singapura, dan Kamboja sebagai pemain terlemah. Namun pada Negara Singapura, menurut Neville (1992) meskipun sektor ini tidak berkontribusi besar terhadap PDB Singapura, namun sektor ini memiliki banyak perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Singapura dan memiliki pola bisnis diversifikasi dengan memiliki kebun pertanian, bisnis perdagangan, serta jual beli antar negara. Menurut Low (2019) Singapura juga melakukan hal yang adaptif dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan salah satunya berbentuk *sustainable urban farms* sebagai bentuk pertanian berkelanjutan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan kontributor pada masing-masing Negara di ASEAN namun memiliki beberapa permasalahan salah satunya pada bidang perpajakan. Sebagai contoh di Indonesia, kontribusi sebesar 12,72 persen dalam PDB negara Indonesia tidak dibarengi dengan kontribusi yang besar pula dalam hal penerimaan perpajakan. Kontribusi perpajakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontribusi perpajakan per sektor yang paling rendah. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,34 persen dari keseluruhan penerimaan perpajakan di Indonesia (Kemenkeu, 2020). Hal ini berbanding terbalik dari besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kepada PDB Indonesia. Padahal peran perpajakan sangat penting sebagai sumber penerimaan negara. Studi lain yang dilakukan di Negara Nigeria oleh Oladipo et al (2019) yang menyatakan bahwa kurangnya kontribusi perpajakan di Negara Nigeria karena peraturan perpajakan yang dikemukakan belum menampung keseluruhan pajak bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kurangnya riset serta pengetahuan di sektor ini juga memberikan kontribusi perpajakan yang rendah. Padahal profitabilitas yang mereka miliki juga menunjang pendapatan warga Negara Nigeria.

Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan produk domestik bruto (PDB) karena pendapatan yang besar di setiap sektor memiliki peningkatan terhadap PDB pula. Hal itu berarti semakin tinggi profitabilitas menyumbang semakin besar pula dengan produk domestik bruto (PDB). Perpajakan juga memiliki kaitan erat dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) karena kontribusi yang besar kepada PDB seharusnya berbanding lurus dengan kontribusi yang besar pula pada penerimaan perpajakan. Herman (2007) menyatakan bahwa peningkatan produk domestik bruto berjalan seiring pula dengan peningkatan penerimaan pajak. Dalam hal ini berarti bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berada pada urutan ketiga sebesar 12,72% (BPS, 2020). Namun kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam penerimaan pajak negara termasuk kontribusi yang paling kecil diantara setiap sektor. Hal ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian penerimaan pajak pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini memiliki dugaan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki dugaan melalui praktik penghindaran

pajak. Padahal, sebaliknya peran perpajakan yang sangat penting untuk sumber penerimaan suatu negara.

Negara sebagai organisasi kekuasaan dengan kedulatannya yang disertai tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib di dalam suatu wilayah / daerah memerlukan sumber penerimaan negara. Pemerintah yang mempunyai salah satu tugas utama memberikan pelayanan masyarakat, mengelola sistem pemerintah, dan menetapkan setiap kebijakan dalam hal mencapai tujuan negara memerlukan pendapatan negara. Pendapatan Negara Indonesia dibagi menjadi tiga pokok sumber pendapatan negara antara lain penerimaan negara yang bersumber dari hibah baik dari luar dan dalam negeri, penerimaan negara selain pajak, serta penerimaan pajak. Penerimaan pajak terbagi menjadi tujuh sektor yakni pajak perdagangan internasional, ekspor, bumi dan bangunan, penjualan atas barang mewah, pertambahan nilai, penghasilan dan yang terakhir adalah bea masuk dan cukai

Perpajakan menurut UU No 16 tahun 2009 memiliki pengertian yakni kewajiban kontribusi kepada negara yang terutang oleh badan ataupun orang pribadi yang disertai paksaan mengacu undang-undang, namun secara langsung tidak ada timbal balik sebab dipergunakan sebesar-besarnya bagi kebutuhan negara. Pajak memiliki fungsi yang amat penting sebagai sumber pendapatan utama negara. Pada APBN 2020, Penerimaan perpajakan berjumlah 1.865,7 Trilyun memiliki porsi terbesar dari keseluruhan pendapatan negara berjumlah 2.233,2 Trilyun atau penerimaan perpajakan sebesar 83,5% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2021). Pada APBN 2019, penerimaan perpajakan berjumlah 1.786,4 T dari total pendapatan negara sebesar 2.165,1 T atau penerimaan perpajakan sebesar 82,5%. Menurut data diatas, dapat digambarkan bahwa penerimaan perpajakan setiap tahun digambarkan meningkat dan rasio terhadap penerimaan perpajakan dibanding dengan total pendapatan negara meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mendukung bergeraknya suatu pemerintahan dan negara. Hal itu sama diungkapkan menurut Adriani (2013) yang menerangkan bahwa pajak sebagai iuran kepada negara dari masyarakat yang bersifat memaksa yang oleh wajib pajak menjadi pembayaran terutang mengacu ketentuan undang-undang dengan tidak langsung memperoleh prestasi

kembali yang bisa ditunjuk yang memiliki fungsi guna pembiayaan setiap pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.

Peran perpajakan yang sangat penting dalam suatu negara tersebut namun tidak disadari penuh oleh seluruh wajib pajak sehingga pajak hanya dimaknai menjadi kewajiban yang memberi tuntutan kepada warga negara dengan mengeluarkan aktiva maupun penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Akibatnya wajib pajak akan berupaya agar beban pajak serendah-rendahnya untuk meningkatkan keuntungan yang mereka peroleh. Seperti di Indonesia, pajak banyak banyak dihindari salah satunya dengan melakukan pembukuan kerugian dalam operasi utama perusahaan sehingga perusahaan tidak dikenai pajak. Hal itu dapat terjadi karena timbulnya beban perusahaan yang besar serta utang perusahaan yang semakin meningkat. Utang perusahaan yang semakin meningkat atau tinggi, menimbulkan kontribusi perpajakan yang semakin rendah (Richardson & Lanis, 2007). Hal itu juga tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan yang mengalami laba dalam melakukan upaya agar terhindar dari pajak yang tujuannya guna membuat beban pajak perusahaan menjadi berkurang. Teori juga memperlihatkan bahwasannya adanya hubungan perpajakan dan keputusan investasi perusahaan (Mossin, 1968 and Stiglitz, 1969). Sehingga perilaku penghindaran pajak dapat dilakukan mengingat berhubungan dengan investor.

Perencanaan pajak yang masih tertera berjalan selaras perundang-undangan yang dinamakan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni upaya yang dilakukan guna membuat total beban pajak terutang berkurang dalam koridor yang legal, meskipun kegiatan disini dapat menimbulkan berbagai risiko seperti buruknya nilai perusahaan dan menimbulkan risiko masuk kedalam sisi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang berarti melebihi batas atau ketentuan yang berlaku dalam undang undang yang termasuk merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal ini diungkapkan oleh Budiman & Setiyono (2012) yaitu pada satu sisi penghindaran pajak diperkenankan untuk dilakukan namun pada sisi lainnya merupakan suatu hal yang tidak diinginkan untuk dilakukan.

Penghindaran pajak yakni cara yang dapat digunakan perusahaan secara legal serta aman karena cara yang diterapkan masih selaras peraturan perundang undangan yang diberlakukan. Mengacu paparan Pohan (2013) menyatakan bahwa *Tax avoidance*

bekerja melalui pemanfaatan celah atas peraturan (*grey area*) yang dipergunakan untuk memperingan jumlah pajak yang terutang. Hal ini mestipun legal, namun juga rawan untuk memperoleh risiko berupa citra reputasi yang buruk dihadapan public dan dapat menimbulkan denda serta sanksi yang berakibat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki berbagai perbedaan dasar dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebab pada dasarnya praktik penggelapan pajak dilakukan guna membuat beban pajak yang dimiliki perusahaan tersebut berkurang namun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan koridor hukum ataupun melanggar hukum. Sedangkan penghindaran pajak dilaksanakan dengan memanfaatkan celah peraturan yang legal. Fenomena penghindaran pajak yakni fenomena yang banyak dijalankan perusahaan. Seperti pada penelitian Dyreng et al (2008) menyatakan bahwa perusahaan di Amerika berusaha untuk menghindari pajak terbukti dengan perusahaan di Amerika hanya membayar pajak kurang dari 20% sedangkan rata rata seharusnya perusahaan di Amerika harus membayar sebanyak lebih dari 30%. Perilaku penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan profitabilitas.

Perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan karena hal itu pun termasuk tujuan perusahaan guna menaikkan laba. Pajak merupakan bagian pengurang dari laba perusahaan yang cenderung untuk mengurangi beban pajak yang berakibat menaikkan laba yang dimiliki perusahaan dan menimbulkan profitabilitas yang semakin tinggi bagi perusahaan. Profitabilitas salah satunya merupakan gambaran terhadap kinerja sebuah perusahaan ketika hendak mendapat keuntungan atau menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Mencapai profitabilitas yang meningkat setiap tahun merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Profitabilitas yang positif memiliki arti bahwa total asset operasional milik perusahaan berdampak positif dalam pertumbuhan laba perusahaan (Yuliyani dan Ekawati, 2017).

Hal ini berhubungan dengan teori agensi yang menimbulkan konflik antar *stockholders vs management*. Jansen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa terdapat konflik ketika pemangku kepentingan menempatkan *agent* dalam suatu perusahaan. Kedua pihak mempunyai konflik kepentingan untuk meningkatkan

profitabilitas karena pemangku kepentingan menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi untuk meningkatkan laba yang dapat mereka ambil. Sedangkan manajemen memerlukan peningkatan profitabilitas sebagai indikator penilaian mereka dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Teori ini juga yang mendukung bahwa manajemen dapat melakukan berbagai cara untuk meraih profitabilitas yang tinggi. Salah satu contohnya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Pola profitabilitas juga berbeda dalam setiap sektor, artinya cara untuk meningkatkan profitabilitas juga sangat beragam dalam keseluruhan sektor.

Tujuan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dapat berbeda dalam setiap sektor. Peningkatan terhadap laba perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti efisiensi produksi, pemasaran, pemilihan penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, penggunaan mesin, dan sebagainya. Oleh karena itu pola untuk meningkatkan profitabilitas yang dilakukan oleh setiap perusahaan di setiap sektor dapat berbeda. Contohnya seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dimana termasuk bagian sektor yang terhubung sebagai kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Pola pertumbuhan laba dalam perusahaan pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat berbeda dengan perusahaan manufaktur. Faktor penentu penjualan perusahaan pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dipengaruhi oleh pola kebutuhan masyarakat, faktor cuaca, ketersediaan stok di masyarakat, proses produksi, dan sebagainya dapat menjadikan pola profitabilitas pada perusahaan pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tidak menentu. Kontribusi terhadap PDB yang besar juga menunjukkan besarnya cakupan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selaras dengan pertumbuhan profitabilitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebaliknya, kontribusi yang kecil terhadap penerimaan perpajakan dapat menimbulkan dugaan bahwa pelaku usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan melakukan upaya penghindaran pajak.

Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berada pada ruang lingkup ASEAN. Negara yang termasuk di ASEAN antara lain Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data perusahaan pertanian, kehutanan, dan

perikanan di ASEAN untuk memberikan cakupan yang lebih luas serta karena negara di ASEAN memiliki karakteristik cuaca, masyarakat, kebutuhan yang serupa. Struktur PDB yang dimiliki oleh masing-masing negara di ASEAN juga memiliki kesamaan dimana struktur PDB mereka ditopang besar oleh kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berbagai penelitian terdahulu yang menjelaskan keterkaitan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak memiliki hasil yang variatif atau berbeda beda. Penelitian yang dilaksanakan oleh Irianto dan Wafirli (2017), Aminah et al. (2017), Koming dan Praditasari (2017), Olivia dan Dwimulyani (2019), Luh dan Puspita (2017), Ramadhani (2020), Putra (2020), Jasmine (2017), dan Saputra (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh positif dari profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil serupa pun diungkapkan oleh Hidayat (2018), Maharani (2014), dan Budianti dan Curry (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu profitabilitas dinilai berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini memiliki arti bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah.

Hal yang berbeda diungkapkan pada penelitian oleh Alfina et al (2018), Wahyuni et al (2017), Irawati et al (2020), dan Cahyono (2016) yaitu menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini mendapatkan kesimpulan bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai hal yang baru di Indonesia serta perusahaan yang melakukan *go public* memiliki persepsi yang rendah. Sehingga perusahaan berusaha untuk menghindari penghindaran pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada negara-negara ASEAN.

2. Untuk membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada masing-masing negara di ASEAN.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian yang diujikan ini tergolong dalam penelitian yang memakai metode kuantitatif serta menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh antara variabel independen (profitabilitas) pada variabel dependen (penghindaran pajak). Data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kuantitatif yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan pertanian, kehutanan, dan perikanan selama periode 2015 – 2019 diperoleh dari situs resmi di setiap bursa efek pada masing-masing Negara di ASEAN. Berikut merupakan situs bursa efek masing-masing negara yaitu www.idx.co.id, www.bursamalaysia.com, www.sgx.com, www.set.or.th, www.hnx.vn, www.lsx.com.la, www.csx.com.kh, www.yss-mm.com, dan www.pse.com.ph. Sampel dipilih berdasarkan suatu kriteria tertentu atau *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Negara-Negara ASEAN dan dari 5 Negara-Negara ASEAN yang diuji yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Terbukti hanya Thailand saja yang profitabilitasnya tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keterbatasan sampel penelitian yang diteliti.

1.6 Kontribusi Riset

Profitabilitas perusahaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pola yang berbeda dengan sektor lain seperti potensi kerugian, pola cuaca, dan sebagainya menyebabkan adanya upaya penghindaran pajak. Beberapa fasilitas perpajakan yang diberikan untuk produk pertanian, kehutanan, serta perikanan juga dapat menjadi upaya penghindaran pajak. Penelitian ini berkontribusi kepada Pemerintah dalam upaya pengurangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penelitian ini mengungkapkan

hasil bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan pertanian, kehutanan, dan perikanan maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi penghindaran pajak tepatnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang bisa mengurangi fenomena ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan susunan sistematika penulisan pada penelitian/skripsi ini dan terdiri dari lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai fenomena yang terjadi yaitu kontribusi PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi peringkat ke-3 dalam keseluruhan PDB nasional namun memiliki kontribusi yang kecil dalam penerimaan perpajakan Indonesia. PDB yang memiliki hubungan berbanding lurus dengan profitabilitas memiliki arti bahwa profitabilitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga sangat tinggi. Namun dengan rendahnya kontribusi perpajakan maka diduga adanya upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Kesenjangan penelitian yang ada adalah perbedaan hasil setiap pengujian, belum adanya pengujian pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan penggunaan proksi penghindaran pajak yang berbeda beda. Tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang mendasari yang menjadi faktor faktor pada penelitian ini, yaitu Teori Agensi (*Agency Theory*), Teori Profitabilitas, Teori Perpajakan, Teori Penghindaran Pajak, serta pengertian mengenai sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan, dan ASEAN. Bab ini juga disertakan hasil dari penelitian terdahulu/sebelumnya, serta pembentukan terhadap kerangka konseptual dan pembentukan hipotesis. Pembentukan hipotesis yang akan diajukan yaitu terkait pengaruh profitabilitas dengan penghindaran pajak sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan baik pada masing-masing Negara di ASEAN maupun pada Negara-Negara ASEAN.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian yang akan dipergunakan, yakni merupakan penelitian kuantitatif, populasi dan sampel yang digunakan, deskripsi operasional serta pengukurannya, serta Teknik pengujian data penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan yang berisi uraian yang memaparkan tentang hasil penelitian yang dilakukan setelah melakukan uji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Negara-Negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang ringkasan dari hasil yang diperoleh dari pengujian hasil penelitian dan saran baik untuk pihak terkait seperti praktisi, pemerintah, pengusaha, investor, dan juga terhadap penelitian di masa depan (akademisi).